

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD**

TAHUN ANGGARAN 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si
NIP : 19731224 199303 1 002
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Menyatakan bahwa data yang kami kirimkan untuk penyusunan LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan IKK LPPD Tahun Anggaran 2023 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan media informasi sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas serta sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan lingkungan hidup baik melalui pelayanan lingkungan hidup formal maupun non formal.

Sumber, 2 Januari 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19731224 199303 1 002

A. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP menangani Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon. Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang usaha atau kegiatannya berpotensi mengganggu lingkungan hidup, disamping pengawasan secara intensif pun terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemenuhan baku mutu air limbah industri. Berkenaan dengan pemanfaatan limbah buangan agar tidak berpotensi menimbulkan pencemaran, maka dilakukan upaya pemanfaatan limbah menjadi energi melalui pemanfaatan biogas. Guna memotivasi masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman melalui pengelolaan limbah ternak secara reguler maupun berkelanjutan, Dalam pengelolaan kebersihan lingkungan persampahan dititikberatkan pada pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat.

2. Kebijakan Umum dan Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 75.349.440.997 dengan realisasi sejumlah Rp. 69.875.350.212 atau 92,74%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 5.474.090.786. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran Tahun 2023

KODE REK	Uraian	DPA	LRA
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000.000	3.750.832.244
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000.000	3.750.832.244
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.000.000.000	3.750.832.244
5.	BELANJA DAERAH	75.349.440.997	69.875.350.212
5.1.	BELANJA OPERASI	42.379.799.997	37.746.401.962
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.585.378.830	5.747.929.082
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.794.421.167	31.998.472.880

5.2.	BELANJA MODAL	32.969.641.000	32.128.948.250
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.689.758.000	23.310.617.500
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.086.951.000	8.638.610.750
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	192.932.000	179.720.000

Selain mengelola Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup juga mengelola Anggaran yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian anggaran sebagai berikut :

**Pengelolaan APBN DAN APBD Provinsi Jawa Barat
Pada DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023**

[Table APBD dan APBN]

Anggaran tersebut diatas merupakan bentuk pemerintahan Pusat dan Provinsi Jawa Barat untuk menunjang pembangunan dibidang Pendidikan yang dialokasikan melalui :

1. Penggunaan Dana Pertama
 - Penjelasan Anggaran
2. Penggunaan Dana Kedua
 - Penjelasan Anggaran

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Untuk capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, selanjutnya dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan ini.

2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian Target Misi Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target Misi Bupati tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berikut merupakan capaian atas target kinerja Tahun 2022 dan 2023.

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51,26	57,09	51,49	56,96
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Prosen	40	30,32	60	45,1
3.	Terwujudnya administrasi Pelayanan dan Sarana/ Prasarana Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran	Prosen	100	100	100	100

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan atas tugas pembantuan merupakan implementasi dari system dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

Pemberian anggaran Tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Adapun tujuan pemberian Tugas pembantuan tersebut adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari(.....) kementerian dan(.....) Dinas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Rincian tugas pembantuan yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut :

**DAFTAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Bidang Urusan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran	%	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1		Kementerian / LPNK	Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan						
2		Dinas..... Prov. Jabar	Peraturan Gubernur No. ... Tahun Ttg.	Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan						
3										

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

- a.
- b.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, DINAS LINGKUNGAN HIDUP telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut :

- a.
- b.

3. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk pelaksanaan tugas pembantuan kami menyampaikan saran dan tindak lanjut sebagai berikut :

- a.
- b.

4. Hal Lain yang perlu untuk dilaporkan

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, DINAS LINGKUNGAN HIDUP perlu menyampaik hal-hal sebagai berikut :

- a.
- b.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan Sembilan (9) Program yaitu program anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Sembilan Belas (19) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.459.972.087,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.7.406.946.942,- (87,55%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.1.053.025.145,- (12,44%) yang merupakan sisa Sementara itu Program Urusan Wajib dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui Delapan (8) Program Kegiatan, dengan Sembilan (9) Kegiatan, dan Lima Belas (15) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 66.889.468.910,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 62.468.803.270,- sisa sebesar Rp. 4.420.665.640,- atau tercapai sebesar 93,39%. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Belanja Operasional dan Modal Pemerintahan yang diselenggarakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terinci sebagaimana tabel berikut:

Program/Kegiatan Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Belanja Daerah				
	Non Urusan	66.889.468.910	62.468.803.270	4.420.665.640	93,39
11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	471.047.900	458.806.168	12.241.732	97,40
11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	471.047.900	458.806.168	12.241.732	97,40
11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	471.047.900	458.806.168	12.241.732	97,40
11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	848.261.200	766.641.368	81.619.832	90,38
11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	598.261.500	517.017.384	81.244.116	86,42
11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	477.215.000	396.189.800	81.025.200	83,02
11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	121.046.500	120.827.584	218.916	99,82

11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	249.999.700	249.623.984	375.716	99,85
11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	249.999.700	249.623.984	375.716	99,85
11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	12.906.635.900	12.170.495.728	736.140.172	94,30
11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	12.906.635.900	12.170.495.728	736.140.172	94,30
11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000	98.298.290	1.701.710	98,30
11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12.685.588.000	11.952.558.454	733.029.546	94,22
11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	121.047.900	119.638.984	1.408.916	98,84
11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	371.047.800	311.925.851	59.121.949	84,07
11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	371.047.800	311.925.851	59.121.949	84,07
11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	171.047.800	127.825.583	43.222.217	74,73
11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	184.100.268	15.899.732	92,05
11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	855.983.800	851.143.384	4.840.416	99,43
11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	855.983.800	851.143.384	4.840.416	99,43
11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	855.983.800	851.143.384	4.840.416	99,43
11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	456.069.110	451.063.378	5.005.732	98,90
11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	456.069.110	451.063.378	5.005.732	98,90
11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	456.069.110	451.063.378	5.005.732	98,90

11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	120.000.000	69.777.500	50.222.500	58,15
11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	120.000.000	69.777.500	50.222.500	58,15
11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	120.000.000	69.777.500	50.222.500	58,15
11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50.860.423.200	47.388.549.893	3.471.873.307	93,17
11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	50.860.423.200	47.388.549.893	3.471.873.307	93,17
11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21.691.937.500	18.966.314.383	2.725.623.117	87,43
11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5.523.583.200	5.165.278.832	358.304.368	93,51
11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	23.644.902.500	23.256.956.678	387.945.822	98,36
	Urusan	8.459.972.087	7.406.946.942	1.053.025.145	87,55
00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.459.972.087	7.406.946.942	1.053.025.145	87,55
00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.612.300	54.698.184	8.914.116	85,99
00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.445.300	40.531.184	8.914.116	81,97
00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.167.000	14.167.000	0	100,00
00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.670.619.387	5.830.929.082	839.690.305	87,41
00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.632.619.387	5.792.929.082	839.690.305	87,34
00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.000.000	19.000.000	0	100,00
00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.000.000	19.000.000	0	100,00
00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	976.624.100	864.979.616	111.644.484	88,57
00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.998.000	13.998.000	0	100,00
00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	247.195.400	246.384.900	810.500	99,67
00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.499.500	89.481.100	18.400	99,98
00.01.2.	Penyediaan Barang Cetak dan	295.000.000	245.350.000	49.650.000	83,17

06.05	Penggandaan				
00.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000	99.966.000	34.000	99,97
00.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	91.000.000	90.947.900	52.100	99,94
00.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	21.025.000	18.975.000	52,56
00.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.931.200	57.826.716	42.104.484	57,87
00.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.986.000	59.986.000	0	100,00
00.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	59.986.000	59.986.000	0	100,00
00.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.998.000	156.969.752	23.028.248	87,21
00.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.998.000	156.969.752	23.028.248	87,21

Hasil dan realisasi dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penunjang pembangunan pada sektor Lingkungan Hidup adalah berapa realisasi anggaran yang telah dipagukan untuk masing-masing kegiatan dan sub kegiatan, dan sejauh mana hasil capaian Output, dan Outcome dari Program dan kegiatan sebagai evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 471.047.900 dan terealisasi sebesar Rp. 458.806.168 sisa sebesar Rp.12.241.732 atau tercapai sebesar 97,40%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 471.047.900 dan terealisasi sebesar Rp. 458.806.168 sisa sebesar Rp. 12.241.732

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 471.047.900 dengan realisasinya Rp. 458.806.168 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 12.241.732 (Pencapaian input 97,40 %).

Sub Output : *Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun, 2 (dua) dokumen.*

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 848.261.200 dan terealisasi sebesar Rp. 766.641.368 sisa sebesar Rp.81.619.832 atau tercapai sebesar 90,38%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 598.261.500 dan terealisasi sebesar Rp. 517.017.384 sisa sebesar Rp. 81.244.116

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 477.215.000 dengan realisasinya Rp. 396.189.800 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 81.025.200 (Pencapaian input 83,02 %) .

Sub Output : *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, 2(dua) dok.*

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 121.046.500 dengan realisasinya Rp. 120.827.584 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 218.916 (Pencapaian input 99,82 %) .

Sub Output : *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan, 3 (tiga) dokumen.*

3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp. 249.999.700 dan terealisasi sebesar Rp. 249.623.984 sisa sebesar Rp. 375.716

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 249.999.700 dengan realisasinya Rp. 249.623.984 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 375.716 (Pencapaian input 99,85 %) .

Sub Output : *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi, 1 (satu) dokumen.*

C. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) sebesar Rp. 12.906.635.900 dan terealisasi sebesar Rp. 12.170.495.728 sisa sebesar Rp.736.140.172 atau tercapai sebesar 94,30%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota sebesar Rp. 12.906.635.900 dan terealisasi sebesar Rp. 12.170.495.728 sisa sebesar Rp. 736.140.172

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasinya Rp. 98.298.290 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.701.710 (Pencapaian input 98,30 %) .

Sub Output : *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun, 3 (tiga) dokumen.*

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 12.685.588.000 dengan realisasinya Rp. 11.952.558.454 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 733.029.546 (Pencapaian input 94,22 %) .

Sub Output : *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan, Kabupaten/Kota, 3,70 Ha.*

c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 121.047.900 dengan realisasinya Rp. 119.638.984 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.408.916 (Pencapaian input 98,84 %) .

Sub Output : *Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 100 orang.*

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) sebesar Rp. 371.047.800 dan terealisasi sebesar Rp. 311.925.851 sisa sebesar Rp.59.121.949 atau tercapai sebesar 84,07%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 371.047.800 dan terealisasi sebesar Rp. 311.925.851 sisa sebesar Rp. 59.121.949

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 171.047.800 dengan realisasinya Rp. 127.825.583 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 43.222.217 (Pencapaian input 74,73 %).

Sub Output : *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan, 43 dokumen*

b. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasinya Rp. 184.100.268 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 15.899.732 (Pencapaian input 92,05 %).

Sub Output : *Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 535 Laporan.*

E. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebesar Rp. 855.983.800 dan terealisasi sebesar Rp. 851.143.384 sisa sebesar Rp.4.840.416 atau tercapai sebesar 99,43%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 855.983.800 dan terealisasi sebesar Rp. 851.143.384 sisa sebesar Rp. 4.840.416.

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 855.983.800 dengan realisasinya Rp. 851.143.384 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.840.416 (Pencapaian input 99,43 %).

Sub Output : *Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan, 1 (satu) dokumen.*

F. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Alokasi anggaran untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebesar Rp. 456.069.110 dan terealisasi sebesar Rp. 451.063.378 sisa sebesar Rp.5.005.732 atau tercapai sebesar 98,90%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 456.069.110 dan terealisasi sebesar Rp. 451.063.378 sisa sebesar Rp. 5.005.732

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 456.069.110 dengan realisasinya Rp. 451.063.378 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.005.732 (Pencapaian input 98,90 %).

Sub Output : *Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH, 5 Entitas.*

G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi anggaran untuk Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.69.777.500 sisa sebesar Rp.50.222.500 atau tercapai sebesar 58,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 69.777.500 sisa sebesar Rp. 50.222.500

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000 dengan realisasinya Rp. 69.777.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 50.222.500 (Pencapaian input 58,15 %).

Sub Output : *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau, Melalui Pengadilan, 17 dokumen.*

H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 50.860.423.200 dan terealisasi sebesar Rp. 47.388.549.893 sisa sebesar Rp.3.471.873.307 atau tercapai sebesar 93,17%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah sebesar Rp. 50.860.423.200 dan terealisasi sebesar Rp. 47.388.549.893 sisa sebesar Rp. 3.471.873.307

Output : 1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sampah

a. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 21.691.937.500 dengan realisasinya Rp. 18.966.314.383 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 2.725.623.117 (Pencapaian input 87,43 %).

Sub Output : Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, 1318012.60 ton.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 5.523.583.200 dengan realisasinya Rp. 5.165.278.832 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 358.304.368 (Pencapaian input 93,51 %).

Sub Output : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 63 Kelompok.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 23.644.902.500 dengan realisasinya Rp. 23.256.956.678 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 387.945.822 (Pencapaian input 98,36 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, 1 (satu) dokumen.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 8.459.972.087 dan terealisasi sebesar Rp. 7.406.946.942 sisa sebesar Rp.1.053.025.145 atau tercapai sebesar 87,55%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.63.612.300 dan terealisasi sebesar Rp. 54.698.184 sisa sebesar Rp. 8.914.116

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.445.300 dengan realisasinya Rp. 40.531.184 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 8.914.116 (Pencapaian input 81,97 %).

Sub Output : *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 dok.*

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 14.167.000 dengan realisasinya Rp. 14.167.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 5(lima) Laporan.*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 6.670.619.387 dan terealisasi sebesar Rp. 5.830.929.082 sisa sebesar Rp. 839.690.305

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 6.632.619.387 dengan realisasinya Rp. 5.792.929.082 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 839.690.305 (Pencapaian input 87,34 %).

Sub Output : *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 45 orang.*

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000 dengan realisasinya Rp. 19.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 10 (sepuluh) Laporan.*

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 19.000.000 dengan realisasinya Rp. 19.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, 10 (sepuluh) Laporan.*

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 976.624.100 dan terealisasi sebesar Rp. 864.979.616 sisa sebesar Rp. 111.644.484

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 13.998.000 dengan realisasinya Rp. 13.998.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, 12 (dua belas) paket.*

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 247.195.400 dengan realisasinya Rp. 246.384.900 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 810.500 (Pencapaian input 99,67 %).

Sub Output : *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, 7 (tujuh) paket.*

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 89.499.500 dengan realisasinya Rp. 89.481.100 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 18.400 (Pencapaian input 99,98 %) .

Sub Output : *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, 10 (sepuluh) paket.*

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 295.000.000 dengan realisasinya Rp. 245.350.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 49.650.000 (Pencapaian input 83,17 %) .

Sub Output : *Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, 18 (delapan belas) paket.*

e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasinya Rp. 99.966.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 34.000 (Pencapaian input 99,97 %) .

Sub Output : *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, 5 (lima) dokumen.*

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 91.000.000 dengan realisasinya Rp. 90.947.900 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 52.100 (Pencapaian input 99,94 %) .

Sub Output : *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, 60 paket.*

g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasinya Rp. 21.025.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 18.975.000 (Pencapaian input 52,56 %) .

Sub Output : *Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, 600 Laporan.*

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 99.931.200 dengan realisasinya Rp. 57.826.716 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 42.104.484 (Pencapaian input 57,87 %) .

Sub Output : *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 52 Laporan.*

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 59.986.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.986.000 sisa sebesar Rp. 0

Output : *2 (dua) unit Tersedianya meubelair untuk sarana kantor*

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 59.986.000 dengan realisasinya Rp. 59.986.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, 2 (dua) unit.*

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 179.998.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.969.752 sisa sebesar Rp. 23.028.248

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 179.998.000 dengan realisasinya Rp. 156.969.752 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 23.028.248 (Pencapaian input 87,21 %).

Sub Output : *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, 3 (tiga) Laporan.*

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 509.132.300 dan terealisasi sebesar Rp. 439.384.308 sisa sebesar Rp. 69.747.992

Output : *1 (satu) Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 210.898.800 dengan realisasinya Rp. 158.837.500 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 52.061.300 (Pencapaian input 75,31 %) .

Sub Output : *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, 23 Unit.*

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 84.897.500 dengan realisasinya Rp. 71.545.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 13.352.500 (Pencapaian input 84,27 %) .

Sub Output : *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, 38 Unit.*

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 88.000.000 dengan realisasinya Rp. 88.000.000 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Pencapaian input 100,00 %) .

Sub Output : *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, 100 Unit.*

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 125.336.000 dengan realisasinya Rp. 121.001.808 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 4.334.192 (Pencapaian input 96,54 %) .

Sub Output : *Jumlah gedung kantor yang dipelihara, 4 (empat) Unit.*

1) Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sampah
2. Penanganan limbah batu alam belum bisa dilakukan karena kompleksnya permasalahan penanganan limbah batu alam

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan solusi-solusi sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam masalah limbah batu alam

2) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

UPTD Laboratorium saat ini hanya mempunyai pejabat struktural Kepala UPTD dan Sub Bagian TU, tapi belum memiliki staf dan sarana prasarana.

UPTD Laboratorium saat ini hanya mempunyai pejabat struktural Kepala UPTD dan Sub Bagian TU, tapi belum memiliki staf dan sarana prasarana.

3) Prestasi-Prestasi

(Meliputi prestasi yang diperoleh atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon / Bupati / Perangkat Daerah / Desa / Kelurahan / Kelompok / Perseorangan pada tingkat Provinsi/ Nasional atau Internasional)

F.TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2022

Berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah memberikan rekomendasi LKPJ Tahun 2022 dan ditindak lanjuti oleh kami sebagaimana tabel berikut :

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Harus ada penambahan personil/SDM pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memaksimalkan pengawasan lingkungan dan ketiadaan tenaga PPNS, Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya mempekerjakan tenaga profesional sebagai penyidik dengan tugas melakukan penyidikan tindak pidana tertentu	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kapasitas SDM DLH melalui pelatihan teknis pengelolaan limbah dan masalah penegakan hukum- Penambahan personil PPLH melalui uji kompetensi	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kemampuan SDM DLH dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup- Menambah PPLH sehingga mempercepat kinerja pengawasan
2	Inventarisasi tanah-tanah kosong milik pemda untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH), karena RTH dikabupaten Cirebon masih kurang	<ul style="list-style-type: none">- Adanya kegiatan peningkatan perluasan pembuatan Ruang Terbuka Hijau baik taman kota, taman wisata alam, taman lingkungan perkantoran dan taman kecamatan.- Penerapan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi pengembang/developer untuk pelaksanaan pembangunan yang di dalamnya ada porsi untuk Ruang Terbuka Hijau.	<ul style="list-style-type: none">- Adanya peningkatan Ruang Terbuka Hijau

3	Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengedukasi/sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memilah sampah, menjaga lingkungan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta pemberdayaan masyarakat mengenai 3R. - Mengadakan koordinasi, sosialisasi dan kerjasama dengan Desa (MOU) khususnya bagi wilayah yang terdapat sampah liar. - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melakukan pemetaan sampah liar dan dilakukan pengangkutan sampah dengan menempatkan container dan dijadwal pengangkutannya secara rutin. - Melakukan komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan desa setempat terkait penanggulangan tumpukan sampah secara darurat/jangka pendek dan selanjutnya/jangka Panjang - Menata sistem pola pelayanan pengangkutan sampah dari desa dengan membuat kesepakatan atau MoU layanan pengangkutan sampah oleh DLH dari TPS desa – desa sekitar dengan penempatan Kontainer Truk Sampah dari DLH - Bekerja sama dengan pihak DPUTR dalam penyediaan sarana dan prasaran TPS 3R di beberapa titik desa percontohan yang dilalui jalan nasional yaitu Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun dan Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung. TPS 3R ini selain sebagai saran pengumpulan sampah dari rumah juga ditampah proses pengurangan sampah yang diangkut ke TPA melalui proses pengolahan - Melakukan proses pendampingan dan bimbingan pada desa-desa yang menjadi prioritas dalam pengelolaan sampah yang wilayahnya terdapat tumpukan sampah liar khususnya di jalan nasional atau provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya lingkungan yang bersih - Penanggulangan tumpukan sampah liar secara cepat dan mencegah timbulnya permasalahan serupa kedepannya. - Melibatkan pemerintah desa setempat dalam pengelolaan sampah yang merupakan tanggung jawab bersama
4	Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku industri dalam pengelolaan limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan edukasi/penyebaran informasi terhadap pelaku usaha kegiatan untuk pengelolaan limbahnya - Membuatkan DED dan kajian pengolahan limbah untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Meminimalkan dampak pencemaran lingkungan - Peningkatan kapasitas dan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana pengawasan pengelola limbah terhadap pelaku usaha - Pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal - Pemberian denda terhadap pencemar lingkungan - Membangunkan IPAL untuk pelaku usaha kelas UMKM agar dapat mengolah limbah-limbahnya 	<p>kepedulian pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan limbah-limbah yang dihasilkan</p> <p>- Peningkatan target kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup</p>
--	--	--	--

PENUTUP

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksa sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat mencapainya sesuai dengan harapan tanpa ada kendala maupun hambatan yang berarti. Namun tentunya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk tahun yang akan datang diharapkan dapat lebih baik.

Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini sangat diharapkan agar tujuan penyusunannya dapat tercapai lebih baik.